



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE

INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT									
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
1. Penataan sebaran, hierarki, dan peran Pelabuhan Perikanan									

1.1. Penumbuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
1.1. Penumbuhan ekonomi jejaring	1. Pelabuhan Perikanan Lappa di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan; dan 3. Pelabuhan Perikanan Lonrae di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber lain yang sah)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Pemerintah Daerah (Pemda)					

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V	
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040	
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan										
2.1. Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya	1. Kabupaten Luwu Timur; 2. Kabupaten Bone; 3. Kabupaten Kolaka; dan 4. Kabupaten Kolaka Utara.	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pemda						

2.2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
2.2. Pengembangan dan Efektivitas Usaha pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					
2.3. Penataan Konektivitas dan Peran Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya			KKP	Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemendagri, dan Pemda					

B. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040	
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut										
1. Pengembangan Akses Pelabuhan Laut yang Menghubungkan Teluk Bone dengan Wilayah Lainnya	1. Pelabuhan Bajoe satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Bajo'e di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau Pemda	Kemen PUPR						
2. Peningkatan Fungsi dan Peran Pelabuhan Laut dalam Pemerataan Ekonomi Wilayah	2. Pelabuhan Barebbo/Kading di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR						
3. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Laut	3. Pelabuhan Belopa di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub atau Pemda	Kemen PUPR						

4. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	4. Pelabuhan Bira/Tanah Beru satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pelabuhan Bone Pute di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Pelabuhan Butung/Kasuso di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;								

7. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	7. Pelabuhan Cappasalo/Malangke di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Pelabuhan Cenrana di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; 10. Pelabuhan Danggae di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;								

11. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	11. Pelabuhan Doping di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan; 12. Pelabuhan Jalang/Cendrane di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Pelabuhan Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Pelabuhan Lampia di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;								

15. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
	15. Pelabuhan Lapangkong/Salameko di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; 16. Pelabuhan Larompong di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan; 17. Pelabuhan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; 18. Pelabuhan Munte di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;								

19. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	19. Pelabuhan Palopo/Tg. Ringgit di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan; 20. Pelabuhan Pattirobajo di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; 21. Pelabuhan P. Burung Lohe di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; 22. Pelabuhan P. Kambuno di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;								

23. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	23. Pelabuhan Sinjai/Larea-rea di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; 24. Pelabuhan Siwa/Bangsalae satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Siwa di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan; 25. Pelabuhan Tuju-Tuju di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;								

26. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
	26. Pelabuhan Uloe di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; 27. Pelabuhan Waetuo di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; 28. Pelabuhan Wotu di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; 29. Pelabuhan Boepinang di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

30. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
	30. Pelabuhan Kolaka satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Kolaka di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara; 31. Pelabuhan Lasusua satu sistem dengan pelabuhan penyeberangan Lasusua di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 32. Pelabuhan Mandahi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

33. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
	33. Pelabuhan Malombo di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara; 34. Pelabuhan Olo-oloho di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 35. Pelabuhan Paria di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; 36. Pelabuhan Pomalaa/Dawi-Dawi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

37. Pelabuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040	
	37. Pelabuhan Watunohu di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 38. Pelabuhan Wollo di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.									
3. Pengembangan Alur Pelayaran	Alur Pelayaran masuk pelabuhan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub	Tentara Nasional Indonesia (TNI)						
II. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT										
A. Kawasan Pemanfaatan Umum										

1. Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V	
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040	
1. Zona Pariwisata										
1.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pariwisata	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)	KKP dan Kemen PUPR						
1.2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Kegiatan Wisata Bahari	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/Baparekraf	KKP dan Kemen PUPR						

1.3. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 17 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
1.3. Pengembangan Upaya Promosi Potensi Zona Pariwisata Teluk Bone	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP dan Kemen PUPR					
1.4. Pemanfaatan Zona Pariwisata Berdasarkan keunggulan, keunikan dan aksesibilitasnya	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					
1.5. Identifikasi Pengembangan Zona Pariwisata untuk Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut	zona U1	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP					

1.6. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
1.6. Peningkatan Keterlibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Zona Pariwisata	zona U1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kememparekraf/ Baparekraf	KKP dan Pemda					
2. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi									
2.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)	KKP dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)					

2.2. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021- 2024)	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	2040
2.2. Pengembangan Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan Memelihara Kelestarian Sumber Daya Alam	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	KKP dan Kemen BUMN					
2.3. Pengendalian Tingkat Pemanfaatan Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM	KKP dan Kemen BUMN					

3. Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040	
3. Zona Perikanan Tangkap										
3.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP							
3.2. Peningkatan Tata Kelola Daerah Penangkapan untuk Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP							

3.3. Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
3.3. Fasilitasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk Penangkapan Ikan Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
3.4. Pengendalian Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan Memperhatikan Daya Dukung dan/atau Jumlah Tangkapan Boleh	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

3.5. Modernisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
3.5. Modernisasi dan/atau Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)					
3.6. Identifikasi Daerah Cadangan Stok Perikanan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
4. Zona Perikanan Budi Daya									

4.1. Penyusunan . . .

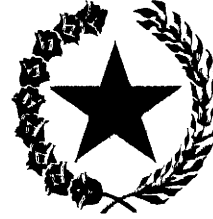


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
4.1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Zona Perikanan Budi Daya	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						
4.2. Pengembangan Zona Perikanan Budi Daya untuk Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya secara Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP						

4.3. Inisiasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
4.3. Inisiasi Usaha Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran Akibat Kegiatan di Darat maupun di Perairan	Zona U9	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)					
B. Kawasan Konservasi di Laut									
1. Identifikasi Calon Lokasi Kawasan Konservasi di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					

2. Pencadangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021-2024)	II (2025-2029)	III (2030-2034)	IV (2035-2039)	V 2040
2. Pencadangan Lokasi Kawasan Konservasi di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					
3. Penetapan Kawasan Konservasi di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					
4. Pengembangan Usaha Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi di Laut yang Mengalami Kerusakan dan/atau Penurunan Fungsi Ekologis	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					

5. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
5. Peningkatan Upaya Tata Kelola Kawasan Konservasi di Laut yang Efektif	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					
6. Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK dan Instansi Non Pemerintah					
7. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Konservasi di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK					

8. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
					(2021-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	2040
8. Pengembangan Kegiatan dalam Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran di Laut	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK					
9. Pengembangan Kegiatan dalam Rangka Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Kawasan C3 2. Kawasan C5	APBN dan/atau sumber lain yang sah	KKP	KLHK					
III. PERWUJUDAN KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL									
A. Pengalokasian Ruang Laut Mendukung Pelaksanaan Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN, dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)					

B. Pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				
			PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2021- 2024)	II (2025- 2029)	III (2030- 2034)	IV (2035- 2039)	V 2040
B. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang Bernilai Strategis Nasional	Lampiran IV	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenko Perekonomian	KKP, Kemen ESDM, Kemen BUMN dan Kemenperin					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Revisi Undang-Undang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Sylvia Silvanna Djaman